

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Akhmad Zaini. 1990. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*. Solo: Pustaka Ramadhan
- Adi, Bayu Jatmiko. 2021. "Palsukan KTP Warga Solo untuk Utang ke Bank, 2 Orang Dibekuk Polisi". <https://www.solopos.com/palsukan-ktp-warga-solo-untuk-utang-ke-bank-2-orang-dibekuk-polisi-1176559>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Adnan, Sobih AW. 2016. "Sejarah Panjang KTP Indonesia". <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0k8gPpPb-sejarah-panjang-ktp-indonesia>. Diakses pada 3 September 2021.
- Akbar, Fauzi. 2021. "Tahun Depan Disdukcapil Pengadaan Card Reader". <https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=16425>. Diakses pada 15 Oktober 2021.
- Amalia, Luky Sandra. 2019. "Evaluasi Carut Marut Data Kependudukan Bahan Penetapan DPT Pemilu Serentak 2019". *Jurnal KPU*. 1(1). Hlm. 1-16.
- Ananta, Nanda Rahma. 2016. "Sejarah KTP di Indonesia". *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Hlm. 1-13.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Anwar, Ridwan. 2017. "Direktur Pencatatan Sipil Kemendagri: SIAK-SIPP-SIMKAH Segera Bersinergi". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/direktur-pencatatan-sipil-kemendagri-siak-sipp-simkah-segera-bersinergi-27-10>. Diakses pada 21 Oktober 2021.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. 1992. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, Kees. 2013. *Etika (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1956. *Bureaucracy in Modern Society*. New York: Random House.
- BPPT. 2013. "Press Release E-KTP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi". <https://www.bppt.go.id/profil/organisasi/100-press-release/press-release-2013/1664-press-release-pusat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-bppt?showall=&limitstart=>. Diakses pada 19 Agustus 2021.
- Dewi, Retia Kartika. 2021. "Warganet Keluhkan Pendaftaran Vaksin Covid-19 Pakai Fotokopi e-KTP, Ini Penjelasan Kemenkes". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/24/101500065/warganet-keluhkan-pendaftaran-vaksin-covid-19-pakai-fotokopi-e-ktp-ini>. Diakses pada 22 Oktober 2021.

- Dewi, Sita dkk. 2020. "Data Penduduk dan E-KTP". *JSI (Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*. 5(1). Hlm. 134-139.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2020. "Tertinggi dalam Sejarah, Cakupan Perekaman KTP-el pada Pilkada 2020". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/600/tertinggi-dalam-sejarah-cakupan-perekaman-ktp-el-pada-pilkada-2020> . Diakses pada 19 Agustus 2021.
- _____. 2021. "Data Dukcapil Semakin Kredibel, Prof. Zudan: 3.856 Lembaga Sudah Kerja Sama dan diakses 6,5 Miliar Kali". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/813/data-dukcapi-semakin-kredibel-prof-zudan-3856-lembaga-sudah-kerja-sama-dan-diakses-65-miliar-kali>. Diakses pada 22 Oktober 2021.
- _____. 2021. "Dirjen Dukcapil: Yang Fotokopi KTP-el Berarti Belum Gunakan Card Reader". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/677/dirjen-dukcapi-yang-fotokopi-ktp-el-berarti-belum-gunakan-card-reader>. Diakses pada 21 Oktober 2021.
- _____. 2021. "Dirjen Zudan Jelaskan Detil Petunjuk Vaksinasi Bagi Warga Belum Punya NIK". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/804/dirjen-zudan-jelaskan-detil-petunjuk-vaksinasi-bagi-warga-belum-punya-nik>. Diakses pada 20 Agustus 2021.
- Disdukcapil Kota Pontianak. 2021. "Alur Status Perekaman KTP-el", <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/alur-status-perekaman-ktpel>. Diakses pada 19 Agustus 2021.
- Ernes, Yogi. 2021. "Bikin Kartu Kredit Pakai KTP Palsu, Pria di Jakarta Bobol Bank Rp 360 Juta". <https://news.detik.com/berita/d-5702262/bikin-kartu-kredit-pakai-ktp-palsu-pria-di-jakarta-bobol-bank-rp-360-juta>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Farisa, Fitria Chusna. 2019. "KPU dan Dukcapil sepakat suket dapat digunakan dalam Pemilu 2019". <https://nasional.kontan.co.id/news/kpu-dan-dukcapi-sepakat-suket-dapat-digunakan-dalam-pemilu-2019>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Frankena, William K. 1982. *Ethics*. New Delhi: Pretince-Hall.
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Josey-Bass Publishers.
- Gedeona, Hendrikus T. W. 2004. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Administrasi Publik*. 3(2). Hlm. 170-188.
- Gie, The Liang. 1989. *Garis Besar Etika Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.

- _____. 1993. *Keadilan sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Gustina dkk. 2020. "Kualitas Pelayanan pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 16(1). Hlm. 66-76.
- Hadi, M. Guntur Merdika. 2019. "Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018". *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hastuti, Rahajeng Kusumo dan Yuni Astutik. 2020. "Kacau! e-KTP Aspal di Balik Pembuatan Rekening Bank Ilegal". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200706141553-37-170526/kacau-e-ktp-aspal-di-balik-pembuatan-rekening-bank-ilegal>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Herdaru. 2020. "NIK Tidak Valid sampai KTP Ganda, Ini 'Dosa' BPJS Kesehatan". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201120105919-4-203313/nik-tidak-valid-sampai-ktp-ganda-ini-5-dosa-bpjs-kesehatan/2>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Humas BPJS Kesehatan. 2015. "Optimalisasi Data Kependudukan Dalam Program JKN KIS". <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/373/Population-Data-Optimization-on-JKN-KIS-Program>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama Kabupaten Klaten. 2021. "Sinergi KUA Karangnom dan Disdukcapil, Implementasikan Integrasi Data Perkawinan". <https://jateng.kemenag.go.id/2021/07/sinergi-kua-karanganom-dan-disdukcapil-implementasikan-integrasi-data-perkawinan/>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. "Pemanfaatan NIK Kemendagri untuk BPJS". <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/11610/pemanfaatan-nik-kemendagri-untuk-bpjs>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2021. "Penerbitan Paspor Republik Indonesia (Paspor RI)". https://kemlu.go.id/dili/id/pages/keimigrasian-penerbitan_paspor_ri_/1760/etc-menu. Diakses pada 22 Oktober 2021.
- Khoiri, Ahmad Masaul. 2015. "Kemendagri Teken Kerjasama dengan 4 Bank Terkait e-KTP". <https://news.detik.com/berita/d-3045646/kemendagri-teken-kerjasama-dengan-4-bank-terkait-e-ktp>. Diakses pada 21 Oktober 2021.

- Khumaini, M. Ali. 2021. "NIK E-KTP Bermasalah, Warga Gagal Mengurus BPJS". <https://megapolitan.antaranews.com/berita/33714/nik-e-ktp-bermasalah-warga-gagal-mengurus-bpjs>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2018. *Etika Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Leony. 2021. "Sertifikat Vaksin Tak Muncul di PeduliLindungi, Ini Penyebab dan Solusinya". <https://www.merdeka.com/peristiwa/sertifikat-vaksin-tak-muncul-di-pedulilindungi-ini-penyebab-dan-solusinya.html>. Diakses pada 23 Oktober 2021.
- Lubis, Syakwan. 2007. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik". *Demokrasi*. 6(1). Hlm. 73-78.
- Muhammad, Mukmin. 2017. *Etika Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyaningsih, S., dan Bertha Lubis. 2018. "Antara Pelayanan KTP-el dan Masyarakat untuk Masyarakat Jawa Barat di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 11 s.d. 13 April 2018". *Jurnal Dukcapil*. 6(1). Hlm. 47-65.
- Murti, Ari Sandita. 2021. "2022, Pasangan Pengantin yang Menikah di KUA Jakarta Dapat KK dan KTP Baru". <https://metro.sindonews.com/read/640517/171/2022-pasangan-pengantin-yang-menikah-di-kua-jakarta-dapat-kk-dan-ktp-baru-1640607172>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Palombara, Joseph La. 1963. *Bureaucracy and Political Development*. New Jersey: Princeton University Press.
- Prihatini, Ramadhani. 2017. "Ingat, pencatatan nikah hanya bisa pakai e-KTP". <https://nasional.kontan.co.id/news/ingat-pencatatan-nikah-hanya-bisa-pakai-e-ktp>. Diakses pada 21 Oktober 2021.
- Ramadhan, Ardito. 2019. "Viral, Kisah Rachmat Bolak-Balik KUA-Dukcapil 12 Kali demi Ubah Status Nikah". <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/01/08194261/viral-kisah-rachmat-bolak-balik-kua-dukcapil-12-kali-demi-ubah-status?page=all>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rauf, Sana. 2020. "Effects of red tape in public sector organizations: a study of government departments in Pakistan". *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*. 23(3). Hlm. 327-338.
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

_____. 2009. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.

_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____. 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

_____. 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

_____. 2013. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ tentang Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

_____. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

_____. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- _____. 2019. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- _____. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. 2021. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kesehatan Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya Yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Rini, Citra Listya. 2013. "Berapa Harga Satu 'Card Reader' E-KTP?". <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/13/mmqpod-berapa-harga-satu-card-reader-ektp>. Diakses pada 17 Agustus 2021.
- Rudiyansyah dan Dahlan. 2018. *Etika Administrasi Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Saptoyo, Rosy Dewi. 2021. "Bisa vaksinasi di mana saja, pemerintah hapus syarat surat keterangan domisili". <https://nasional.kontan.co.id/news/bisa-vaksinasi-di-mana-saja-pemerintah-hapus-syarat-surat-keterangan-domisili>. Diakses pada 23 Oktober 2021.
- Saragih, Samdysara. 2019. "Uji Materi UU Pemilu: KTP Elektronik Bukan Syarat Wajib Nyoblos, Potensi Pemilih Ganda Besar". <https://kabar24.bisnis.com/read/20190325/15/903957/uji-materi-uu-pemilu-ktp-elektronik-bukan-syarat-wajib-nyoblos-potensi-pemilih-ganda-besar>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Septiyarini, Dwi dan Resky Nanda Pranaka. 2019. "Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas". *Jurnal Administrasi Publik*. 7(1). Hlm. 30-42.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solomon, Robert C. 1987. *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Stahl, O. Glen. 1983. *Public Personnel Administration*. New York: Harper & Row.
- Suhardi, Gaudensius. 2020. "KTP-el Mutlak". <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/JKRA4eOk-ktp-el-mutlak>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

- Thompson, Dennis F. 1985. "The Possibility of Administrative Ethics". *Public Administration Review*. 45(5). Hlm. 555-561.
- Tiaji, Fuji. 2019. "Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kantor Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 6(2). Hlm. 111-116.
- Velarosdela, Rindi Nuris. 2021. "Vaksinasi Covid-19 Terganjal NIK Dipakai Orang Lain, Harus Laporkan ke Mana?". <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/05/11550091/vaksinasi-covid-19-terganjal-nik-dipakai-orang-lain-harus-lapor-ke-mana>. Diakses pada 23 Oktober 2021.
- Weiner, Myron dan Samuel P. Huntington. 1987. *Understanding Political Development*. Boston: Little, Brown & Company.
- Wicaksono, Bagus. 2012. "Hubungan Antara Iklim Organisasi dengan Moral Kerja Karyawan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.